

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Perbedaan di antara wewenang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Republik Chili yaitu dalam model melakukan pengujian perundang-undangan. Kemudian, Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat melaksanakan pemutusan sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi Chili mempunyai kewenangan pertanyaan konstitusional dan penafsiran konstitusi., mengatur juga masalah-masalah yang sangat; b. Persamaan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Chili yaitu kedua negara ini sama-sama mengakui adanya pengujian konstitusionalitas perundang-undangan, kewenangan pembubaran partai, pemutusan sengketa kewenangan antar lembaga negara, Adanya kewenangan untuk melakukan pemakzulan
2. Model pelaksanaan *judicial review* di Indonesia yaitu dengan menggunakan metode pengujian terhadap undang-undang yang sudah disahkan. Metode pengujian yang digunakan Indonesia menganut model Austria atau disebut *continental model* yang didasarkan pada pemikiran dari Hans Kelsen dengan salah satu ciri khasnya ada menentukan salah satu lembaga khusus yakni Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. Sedangkan model pelaksanaan *judicial review* di Chili yaitu melakukan pengujian terhadap rancangan undang-undang dan perjanjian internasional yang belum disahkan oleh parlemen. Model pengujian konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Chili menggunakan metode Austria yang berbeda dengan Indonesia karena melakukan pengujian terhadap rancangan undang-undang dan perjanjian internasional tetapi dengan lembaga yang dibentuk khusus yakni Mahkamah Konstitusi

B. Saran

Alangkah baiknya, jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberikan peluang untuk melakukan pengujian terhadap rancangan undang-undang. Karena dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya boleh melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap peraturan undang-undang yang telah diundangkan. Hal ini sejalan dengan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terus diperbaiki sehingga memberikan kewenangan untuk melakukan pengujiannya terhadap rancangan undang-undang seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Chili yang mungkin juga dapat memberikan solusi dan peluang agar kedepannya Indonesia dapat mempunyai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mempunyai kualitas yang lebih baik lagi sehingga dapat mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga pentingnya, memperjelas atau memperdalam lagi teknis-teknis kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi seperti yang dilakukan oleh Republik Chili. Seperti yang diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Chili mempunyai kewenangan yang lebih banyak daripada Indonesia mencakup hal-hal teknisnya juga yang tertuang dalam konstitusi dan amandemen konstitusi terbarunya.

